

## Tinjauan Peran Pemerintah dalam Penyediaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia

Sri Rosni Alfiat Laia<sup>1\*</sup>, Aqilah Apritia Parawanza<sup>2</sup>, Sarah Desnita Manihuruk<sup>3</sup>, Jenaya Febina<sup>4</sup>, Yolanda Tampubolon<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20221

E-mail: [srirosnialfiatlaia@gmail.com](mailto:srirosnialfiatlaia@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4008>

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article history

Received: 06 Dec 2025

Revised: 12 Dec 2025

Accepted: 18 Dec 2025

#### Kata Kunci:

Barang dan Jasa Publik, Ekonomi Publik, Peran Pemerintah.

#### Keywords:

Public Goods and Services, Public Economics, Role of Government.



Penyediaan barang dan jasa publik merupakan fungsi utama pemerintah dalam sistem ekonomi modern karena sifatnya yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Barang publik memiliki karakteristik *non-rivalry* dan *non-excludability* sehingga menimbulkan kegagalan pasar dan memerlukan intervensi negara untuk menjamin penyediaannya secara merata. Penelitian ini bertujuan memberikan tinjauan komprehensif mengenai peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik di Indonesia, dengan fokus pada landasan teoretis, bentuk intervensi pemerintah, serta tantangan implementatif pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) melalui analisis literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta buku teks ekonomi publik. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengintegrasikan konsep teoretis dengan praktik kebijakan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berperan sebagai penyedia langsung, regulator, dan fasilitator kerja sama dalam penyediaan barang publik. Meskipun kebijakan pemerintah telah meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, tantangan seperti ketimpangan antarwilayah, keterbatasan anggaran, serta permasalahan tata kelola masih membatasi efektivitas penyediaan barang publik.

*The provision of public goods and services is a primary function of government in a modern economic system due to their nature, which cannot be optimally provided by market mechanisms. Public goods have the characteristics of non-rivalry and non-excludability, which give rise to market failures and require state intervention to ensure equitable provision. This study aims to provide a comprehensive overview of the government's role in the provision of public goods and services in Indonesia, with a focus on the theoretical basis, forms of government intervention, and implementation challenges in strategic sectors such as education, health, security, and infrastructure. The research method uses a library research approach through analysis of academic literature, scientific journals, official government reports, and public economics textbooks. The analysis is conducted descriptively and qualitatively to integrate theoretical concepts with policy practices in Indonesia. The results of the study indicate that the Indonesian government plays a role as a direct provider, regulator, and facilitator of cooperation in the provision of public goods. Although government policies have improved access to and the quality of public services, challenges such as inter-regional disparities, budget constraints, and governance issues continue to limit the effectiveness of public goods provision.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Kuncoro Singgih Prasojo, et al (2025). Analisis Kinerja Algoritma C4.5 pada Dataset Titanic yang Tidak Seimbang Menggunakan Gain Ratio, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4008>

## PENDAHULUAN

Penyediaan barang dan jasa publik merupakan salah satu mandat fundamental yang melekat pada peran pemerintah dalam perekonomian modern. Dalam kerangka ekonomi publik, pemerintah hadir untuk mengatasi berbagai bentuk kegagalan pasar (market failures), terutama pada barang publik yang memiliki sifat non-excludability dan non-rivalry. Tanpa intervensi pemerintah, barang publik cenderung tidak disediakan secara memadai karena mekanisme pasar tidak memiliki insentif untuk memproduksinya pada tingkat optimal. Fenomena free rider menyebabkan individu menikmati manfaat tanpa bersedia membayar biaya penyediaan, sehingga sektor swasta tidak mampu menghasilkan barang publik dengan efisien. Oleh sebab itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memastikan tersedianya barang publik bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, penyediaan barang dan jasa publik memiliki urgensi yang semakin tinggi seiring dinamika pembangunan nasional dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar. Layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, lingkungan, serta infrastruktur menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural berupa ketimpangan wilayah, keterbatasan kapasitas fiskal, dan variasi kualitas tata kelola antara pusat dan daerah. Dalam konteks tersebut, penyediaan barang publik oleh pemerintah bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga merupakan dimensi sosial, politik, dan kelembagaan.

Perkembangan kebijakan publik di Indonesia memperlihatkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan porsi besar anggaran untuk sektor-sektor strategis yang termasuk kategori barang publik. Sejak implementasi desentralisasi fiskal pada tahun 2001, tanggung jawab penyediaan barang publik semakin tersebar ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat kini berperan dalam penetapan kebijakan makro, standar layanan, dan transfer fiskal, sementara pemerintah daerah berfokus pada implementasi layanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan infrastruktur lokal. Namun desentralisasi tidak serta-merta menjamin pemerataan kualitas layanan. Variasi kapasitas administratif dan finansial antara daerah menimbulkan disparitas layanan publik yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan barang publik tidak hanya membutuhkan anggaran, tetapi juga kapasitas manajerial dan tata kelola yang baik. Secara teoretis, fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik berkaitan erat dengan pandangan Musgrave tentang tiga fungsi utama pemerintah: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Penyediaan barang publik berada pada fungsi alokasi, yaitu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien untuk menghasilkan layanan yang tidak dapat disediakan oleh pasar. Namun dalam praktiknya, penyediaan barang publik juga memiliki implikasi terhadap fungsi distribusi, karena meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, kualitas barang publik sering kali menentukan stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, peran pemerintah dalam menyediakan barang publik tidak dapat dipandang secara terisolasi, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.

Meskipun pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam menyediakan barang publik, tantangan yang dihadapi tidak sederhana. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu isu utama, terutama ketika pemerintah harus menyeimbangkan berbagai kebutuhan prioritas. Di Indonesia, belanja untuk pendidikan dan kesehatan telah meningkat dalam dua dekade terakhir, namun tantangan kualitas dan pemerataan masih terus muncul. Selain itu, isu tata kelola seperti korupsi, rendahnya transparansi, dan lemahnya efektivitas program masih sering menjadi hambatan dalam penyediaan layanan publik. Tantangan lainnya adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi kebijakan, terutama pada level daerah yang memiliki variasi kapasitas administratif. Perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan global juga mengharuskan pemerintah melakukan inovasi dalam penyediaan barang publik. Modernisasi infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, dan kerja sama pemerintah dengan sektor swasta merupakan contoh strategi yang semakin banyak diadopsi. Skema seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Namun kerja sama tersebut tetap membutuhkan regulasi yang kuat agar tidak mengurangi aksesibilitas dan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, kajian mengenai peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik menjadi relevan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini memperkuat pemahaman mengenai konsep barang publik, kegagalan pasar, serta fungsi pemerintah

dalam kerangka ekonomi publik. Secara praktis, kajian ini memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan pemerintah di Indonesia telah diimplementasikan dan apa saja tantangan yang masih dihadapi. Dengan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemetaan yang jelas mengenai peran pemerintah serta memberikan sintesis mengenai strategi optimalisasi penyediaan barang publik. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menguraikan landasan teoretis mengenai barang publik dan alasan pemerintah harus terlibat dalam penyediaannya. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik di Indonesia. Ketiga, mengevaluasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam proses penyediaan barang publik pada berbagai sektor strategis. Keempat, merumuskan implikasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penyediaan barang dan jasa publik di masa depan.

Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, kelembagaan, dan tata kelola yang memengaruhi efektivitas penyediaan barang publik. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi kebijakan publik. Penelitian ini juga menyediakan kontribusi bagi diskursus ilmiah mengenai bagaimana negara berkembang seperti Indonesia dapat memperkuat peran pemerintah dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyediaan barang dan jasa publik.

## **METODE**

### ***Desain Penelitian***

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Desain penelitian ini dipilih karena fokus utama kajian bukan pada pengumpulan data empiris lapangan, melainkan pada analisis sistematis terhadap konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya mengenai peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Studi pustaka memungkinkan peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap bahan-bahan ilmiah yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif tentang isu yang dikaji tanpa memerlukan pengolahan data kuantitatif atau uji statistik. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis, mulai dari teori ekonomi publik, teori kegagalan pasar, hingga kerangka kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memetakan kondisi aktual penyediaan barang publik di Indonesia, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka konseptual yang lebih luas, sehingga argumen yang dibangun tetap kuat secara akademik. Penelitian kualitatif melalui studi pustaka sangat sesuai bagi kajian yang bersifat konseptual, normatif, analitis, dan evaluatif seperti pada topik ini.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen resmi. Adapun jenis-jenis sumber data yang digunakan meliputi:

1. Buku teks akademik pada bidang ekonomi publik, ekonomi pembangunan, kebijakan publik, dan ekonomi pemerintahan. Buku ini menjadi landasan utama dalam memahami konsep dasar seperti karakteristik barang publik, peran pemerintah, dan fungsi alokasi.
2. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks dalam platform seperti Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR, dan DOAJ. Artikel jurnal digunakan untuk memperkuat analisis dengan temuan empiris atau analisis teoretis terbaru.
3. Laporan dan dokumen pemerintah, seperti Undang-Undang APBN, laporan Kementerian Keuangan, Bappenas, serta publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Dokumen ini digunakan untuk memahami realisasi penyediaan barang publik di Indonesia.
4. Regulasi dan kebijakan pemerintah, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang terkait penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur.
5. Laporan organisasi internasional, seperti World Bank, OECD, dan UNDP yang memberikan data komparatif dan analisis perbandingan mengenai penyediaan barang publik di berbagai Negara.

Keberagaman sumber ini memungkinkan penelitian membangun analisis yang seimbang antara teori dan praktik, serta melihat isu dari berbagai sudut pandang akademik dan kebijakan.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen (documentary analysis). Teknik ini melibatkan proses mengidentifikasi, memilih, membaca, dan mengevaluasi berbagai bahan pustaka yang relevan secara sistematis. Tahapan pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Identifikasi literatur  
Peneliti terlebih dahulu menentukan kata kunci pencarian seperti public goods, government provision, public sector economics, fiscal policy, public service delivery, Indonesia public sector untuk memperoleh literatur yang sesuai topik.
2. Seleksi sumber  
Sumber yang dipilih adalah sumber yang kredibel, terbit dalam rentang waktu relevan, dan memiliki keterkaitan kuat dengan topik penelitian. Sumber yang tidak memiliki validitas akademik atau tidak relevan dieliminasi.
3. Pembacaan mendalam  
Literatur yang terpilih dibaca secara komprehensif untuk memahami kerangka teori, temuan penelitian, serta diskusi kebijakan yang terkandung di dalamnya.
4. Pencatatan tematik  
Informasi penting dicatat berdasarkan tema-tema tertentu seperti peran pemerintah, teori barang publik, tantangan penyediaan layanan publik, serta strategi peningkatan kualitas kebijakan.
5. Pengorganisasian informasi  
Data dari berbagai sumber kemudian diorganisasikan ke dalam struktur penelitian agar analisis yang dilakukan bersifat terarah dan konsisten.

#### ***Teknik Analisis Data***

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-kualitatif. Teknik ini dipilih karena sesuai untuk menginterpretasi teks, konsep, argumen, serta kebijakan yang dibahas dalam literatur.

1. Analisis Isi (Content Analysis)  
Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasi makna dari berbagai literatur yang dikaji. Langkah-langkahnya meliputi:
  1. Mengkodekan informasi dari literatur berdasarkan kategori tertentu seperti jenis barang publik, peran pemerintah, model intervensi, dan tantangan kebijakan.
  2. Membandingkan argumen dan temuan antar literatur untuk mendapatkan akar masalah dan pola yang konsisten.
  3. Menyintesis data menjadi konsep-konsep yang utuh dan dapat mendukung pembahasan.
2. Analisis Deskriptif-Kualitatif  
Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena penyediaan barang publik oleh pemerintah dalam konteks Indonesia tanpa melakukan perhitungan statistik. Analisis dilakukan dengan:
  1. Menghubungkan teori ekonomi publik dengan praktik kebijakan pemerintah,
  2. Mendeskripsikan peran pemerintah dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan,
  3. Mengevaluasi efektivitas penyediaan barang publik berdasarkan data dan laporan resmi.

#### ***Batasan Penelitian***

Penelitian ini memiliki beberapa ruang lingkup dan batasan yang perlu dijelaskan secara akademik:

1. Penelitian bersifat teoretis dan konseptual  
Fokus kajian adalah analisis teoretis dan studi kebijakan, sehingga tidak melakukan pengumpulan data primer dari lapangan.
2. Tidak melakukan pengujian empiris  
Penelitian tidak menggunakan metode kuantitatif, survei, uji regresi, atau analisis statistik lainnya. Hasil kajian bersifat analitis dan deskriptif.
3. Literatur yang digunakan terbatas pada sumber yang tersedia dan dapat diakses  
Ketersediaan literatur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kedalaman pembahasan.
4. Analisis bersifat general dan tidak fokus pada satu daerah  
Penelitian meninjau peran pemerintah pada level nasional, bukan pada tingkat provinsi atau kabupaten tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyediaan barang dan jasa publik merupakan salah satu isu fundamental dalam ekonomi publik karena berkaitan langsung dengan fungsi pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan pemerataan akses di masyarakat. Dalam literatur ekonomi, barang publik memiliki sifat non-rivalry dan non-excludability yang menyebabkan pasar tidak mampu menyediakan barang tersebut secara efisien. Ketika suatu barang tidak dapat membatasi konsumennya dan tidak berkurang ketika dikonsumsi oleh orang lain, mekanisme pasar tidak memiliki insentif untuk memproduksinya dalam jumlah optimal. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk mengambil alih fungsi penyediaan barang publik agar dapat menjamin pemerataan akses, efisiensi alokasi, dan stabilitas sosial. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman geografis, sosial, dan ekonomi, penyediaan barang publik menjadi semakin kompleks karena harus menjawab kebutuhan masyarakat yang sangat beragam.

Peran pemerintah dalam penyediaan barang publik dapat dipahami melalui teori klasik ekonomi publik yang menekankan fungsi alokasi negara untuk mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa barang yang bersifat publik tersedia dalam jumlah cukup dan berkualitas. Namun, penyediaan barang publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan langsung oleh pemerintah, tetapi juga mencakup regulasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyedia layanan. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia memadukan berbagai bentuk intervensi ini dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan kapasitas kelembagaan yang ada. Peran ini terlihat dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan yang menjadi fokus utama pemerintah dalam menyediakan layanan publik.

Dalam sektor pendidikan, penyediaan layanan publik memiliki signifikansi yang sangat besar karena pendidikan dipandang sebagai merit goods yang memiliki eksternalitas positif bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan dengan mengalokasikan anggaran minimal 20 persen APBN untuk sektor ini. Penyediaan barang publik di bidang pendidikan dilakukan melalui pembangunan dan pengelolaan sekolah negeri, penyediaan guru dan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum nasional, serta pemberian bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar. Penyediaan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan akses dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan masih menghadapi masalah besar seperti ketimpangan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan fasilitas di wilayah tertinggal, dan kualitas pembelajaran yang belum merata. Laporan internasional seperti PISA mengindikasikan bahwa kompetensi dasar siswa Indonesia dalam literasi, numerasi, dan sains masih relatif rendah dibanding negara lain. Hal ini menjadi bukti bahwa penyediaan pendidikan sebagai barang publik memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran, tetapi juga perbaikan tata kelola, peningkatan kompetensi guru, dan inovasi pembelajaran.

Sektor kesehatan juga menunjukkan bagaimana pemerintah berperan signifikan dalam penyediaan barang publik. Dalam perspektif ekonomi publik, kesehatan adalah barang dengan eksternalitas besar karena kesehatan individu berpengaruh pada produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan milik negara seperti puskesmas dan rumah sakit daerah. Selain itu, program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan kesehatan universal kepada seluruh warga. Kebijakan ini bertujuan mengurangi hambatan finansial terhadap akses kesehatan serta mendorong pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam implementasinya, penyediaan kesehatan sebagai barang publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses di daerah terpencil, kelemahan distribusi tenaga medis, serta tekanan finansial pada sistem pembiayaan JKN yang sering mengalami defisit. Tantangan ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan kesehatan membutuhkan integrasi kebijakan antara pembiayaan, penyediaan fasilitas, manajemen mutu layanan, dan peningkatan efisiensi sistem kesehatan.

Infrastruktur merupakan sektor lain yang menggambarkan peran strategis pemerintah dalam menyediakan barang publik. Infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, listrik, dan air bersih memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi dan menciptakan konektivitas wilayah. Banyak jenis infrastruktur yang dikategorikan sebagai quasi-public goods, yaitu barang yang memiliki unsur publik dan privat sekaligus. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan

investasi infrastruktur melalui APBN, BUMN, dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan mobilitas, serta memperluas akses ekonomi bagi wilayah-wilayah tertinggal. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini juga menghadapi berbagai kendala seperti ketergantungan pada BUMN, proses pembebasan lahan yang kompleks, serta kurang optimalnya pemeliharaan terhadap infrastruktur yang telah selesai dibangun. Hambatan-hambatan tersebut menurunkan efektivitas penyediaan barang publik dan mengurangi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Di sektor keamanan, pemerintah memiliki peran absolut karena keamanan adalah barang publik murni yang tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. Keamanan nasional, ketertiban umum, dan penegakan hukum hanya dapat dijalankan oleh institusi negara seperti kepolisian, militer, dan lembaga peradilan. Keamanan memberikan kepastian hukum dan stabilitas sosial yang menjadi syarat dasar bagi kegiatan ekonomi dan investasi. Tanpa keamanan yang kuat dan sistem peradilan yang efektif, seluruh sektor ekonomi dapat terganggu. Namun, penyediaan keamanan di Indonesia juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran untuk modernisasi peralatan, persepsi publik mengenai integritas aparat, dan masalah etik dalam penegakan hukum. Perbaikan dalam profesionalitas dan transparansi sangat diperlukan untuk menjaga legitimasi dan efektivitas penyediaan keamanan sebagai barang publik.

Selain tantangan per sektor, penyediaan barang publik di Indonesia juga menghadapi persoalan struktural yang lebih luas. Kapasitas fiskal menjadi salah satu masalah utama karena meskipun APBN meningkat setiap tahun, kebutuhan penyediaan barang publik jauh lebih besar daripada kapasitas anggaran. Sebagian besar belanja pemerintah masih terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan terbatas. Selain itu, ketimpangan antarwilayah membuat pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memastikan pemerataan layanan publik. Daerah perkotaan memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik dibanding wilayah terpencil atau tertinggal. Ketimpangan ini menyebabkan distribusi kesejahteraan tidak merata dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Masalah tata kelola juga menjadi tantangan besar dalam penyediaan barang publik. Korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan lemahnya pengawasan internal seringkali menghambat efektivitas implementasi kebijakan publik. Dalam beberapa kasus, penyediaan barang publik tidak mencapai sasaran karena alokasi anggaran yang kurang tepat, pelaksanaan proyek yang tidak sesuai standar, atau kurangnya transparansi dalam proses pengadaan. Permasalahan tata kelola ini berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di sektor publik. Apabila tata kelola tidak diperbaiki, peningkatan anggaran sekalipun tidak akan menghasilkan peningkatan kualitas layanan publik secara signifikan.

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas penyediaan barang publik adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi layanan publik. Padahal, teori ekonomi publik modern menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme co-production barang publik. Ketika masyarakat terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan layanan publik, kualitas dan relevansi layanan dapat meningkat. Namun, budaya partisipasi yang masih terbatas dan akses informasi yang belum merata membuat keterlibatan masyarakat masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan 3T.

Perkembangan teknologi digital sebenarnya membuka peluang besar untuk memperbaiki penyediaan barang publik. Digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan memperluas akses, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik. Namun, adopsi teknologi masih belum merata karena perbedaan kualitas infrastruktur digital antarwilayah serta kemampuan SDM yang belum sepenuhnya siap. Hal ini membuat potensi digitalisasi belum bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen penyediaan barang publik.

Berdasarkan keseluruhan analisis literatur, penyediaan barang dan jasa publik di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi tantangan yang kompleks. Peran pemerintah sudah mencakup penyediaan langsung, regulasi, dan fasilitasi kerja sama dengan sektor swasta. Namun, efektivitas penyediaan barang publik masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, tata kelola, kualitas SDM, dan kesenjangan antarwilayah. Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas belanja, penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Tanpa reformasi ini,

penyediaan barang publik akan sulit mencapai standar kualitas yang diharapkan dan tidak mampu menjadi pengungkit utama pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyediaan barang dan jasa publik merupakan fungsi esensial pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional, terutama karena sifat barang publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Pemerintah Indonesia telah menjalankan peran sebagai penyedia langsung, regulator, dan fasilitator dalam berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan, sehingga akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin meningkat. Namun, efektivitas penyediaan barang publik masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan kapasitas fiskal, ketimpangan antarwilayah, masalah tata kelola, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi penyediaan barang publik membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas belanja, transparansi, serta inovasi kebijakan agar layanan publik dapat lebih merata, efisien, dan berkelanjutan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian dan artikel ini. Terima kasih disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan. Penulis juga menghargai dukungan teman-teman satu kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dalam pengumpulan literatur, diskusi, serta penyusunan naskah secara keseluruhan. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada seluruh lembaga dan sumber rujukan yang menyediakan data dan informasi yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ekonomi publik dan menjadi referensi bagi pembaca yang membutuhkan.

### **REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023. BPS.
- Boadway, R., & Wildasin, D. (1984). Public sector economics. Little, Brown and Company.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). APBN Kita: Informasi APBN dan ekonomi terkini. Kemenkeu RI.
- Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. McGraw-Hill.
- OECD. (2019). Government at a glance 2019. OECD Publishing.
- Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. *The Review of Economics and Statistics*, 36(4), 387–389.
- Stiglitz, J. E. (1989). Markets, market failures, and development. *The American Economic Review*, 79(2), 197–203.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the public sector (4th ed.). W.W. Norton & Company.
- UNDP. (2021). Human development report 2021/2022. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2020). Public expenditure review: Improving public service delivery in Indonesia. World Bank Publications.